

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - DANA DESA - TRANSFER KE DAERAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.07/2017 TANGGAL 1 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1081)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No.135, TLN 4151); UU 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.78, TLN 4301); UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN 4438); UU 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.62, TLN 4633); UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN 5339); PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN 4575); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN 5423); PP 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168, TLN 5558); PMK 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537)

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 sebagai berikut:

1. Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum
2. Pasal 22 mengenai penyampaian data perkiraan PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi
3. Pasal 46 mengenai penghitungan realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota
4. Pasal 61 dan Pasal 62 mengenai penghitungan dan penetapan alokasi DID.
5. Pasal 74 mengenai besaran alokasi Penyaluran DBH PBB bagian daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota
6. Pasal 75 mengenai besaran alokasi Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND
7. Pasal 77 mengenai besaran alokasi SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan Panas Bumi.
8. Pasal 79 mengenai penambahan laporan belanja Infrastruktur Daerah sebagai bahan pertimbangan penyaluran DAU.
9. Pasal 80 mengenai besaran penyaluran DAK Fisik.
10. Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 mengenai penyaluran DAK Fisik
11. Pasal 88 mengenai Penyaluran Dana BOP PAUD
12. Pasal 90 mengenai Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD
13. Pasal 91 mengenai Penyaluran Dana BOK
14. Pasal 94 mengenai Penyaluran Dana Pelayanan Admindak
15. Pasal 96 mengenai Penyaluran DID
16. Pasal 99, Pasal 100, Pasal 107, dan Pasal 109 mengenai Penyaluran Dana Desa
17. Pasal 122 mengenai kewajiban penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah oleh Kepala Daerah
18. Pasal 133 dan Pasal 134 mengenai Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011
19. Pasal 154 mengenai Penundaan Penyaluran Dana Desa.
20. Pasal 165 mengenai Ketentuan Peralihan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini mengubah 50/PMK.07/2017.